

Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau–Johor Bahru melalui Sosek Malindo dalam Program Jiran Istimewa (Jiwa)

Amelia^{1*}, Herry Wahyudi², Rizqi Apriani Putri³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ameliamel010505@gmail.com

Abstract. *This study examines the paradiplomacy of the Riau Islands Provincial Government with Johor Bahru through the Malaysia–Indonesia Socio-Economic Cooperation (Sosek Malindo) in the Jiran Istimewa (JIWA) Program. The study aims to understand how the cooperation is implemented, including the roles of actors, coordination patterns, outcomes, and supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature study, with informants selected purposively from the Consulate General of the Republic of Indonesia in Johor Bahru, the Riau Islands Regional Border Management Agency, and the Riau Islands Tourism Office. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that JIWA represents a form of subnational paradiplomacy that emerged through a bottom-up and collaborative initiative. The program was formulated in 2024, discussed in the Sosek Malindo forum in 2025, and launched in Batam on 17 May 2025. Its implementation includes digital tourism promotion, special offers for residents of the Riau Islands and Johor, participation of local businesses, and strengthening socio-economic interaction across the border. The program involved 120 tenants, consisting of 84 in the Riau Islands and 36 in Johor. However, implementation is constrained by regulatory and jurisdictional limitations, coordination challenges, and the absence of a clear roadmap and shared performance indicators. The study implies that sustainable paradiplomacy requires stronger coordination, clearer institutional arrangements, and measurable long-term planning.*

Keywords: *Cross-Border Cooperation; Jiran Istimewa; Johor Bahru; Paradiplomacy; Riau Islands.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Johor Bahru melalui kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) dalam Program Jiran Istimewa (JIWA). Penelitian bertujuan memahami implementasi kerja sama, meliputi peran aktor, pola koordinasi, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dengan informan yang dipilih secara purposive dari KJRI Johor Bahru, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JIWA merupakan bentuk paradiplomasi subnasional yang berkembang melalui inisiatif bottom-up dan kolaboratif. Program dirumuskan pada 2024, dibahas dalam forum Sosek Malindo pada 2025, dan diluncurkan di Batam pada 17 Mei 2025. Implementasinya mencakup promosi pariwisata digital, pemberian penawaran khusus bagi masyarakat Kepulauan Riau dan Johor, keterlibatan pelaku usaha, serta penguatan interaksi sosial ekonomi lintas batas. Program melibatkan 120 tenant, terdiri atas 84 tenant di Kepulauan Riau dan 36 tenant di Johor. Namun, implementasinya masih menghadapi keterbatasan regulasi dan kewenangan, kendala koordinasi, serta belum adanya roadmap dan indikator keberhasilan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan paradiplomasi memerlukan koordinasi yang lebih kuat, pengaturan kelembagaan yang jelas, dan perencanaan jangka panjang yang terukur.

Kata Kunci: Jiran Istimewa; Johor Bahru; Kepulauan Riau; Kerja Sama Lintas Batas; Paradiplomasi.

1. LATAR BELAKANG

Paradiplomasi merupakan praktik hubungan internasional yang melibatkan pemerintah daerah sebagai aktor subnasional dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah atau institusi di luar negeri. Perkembangan paradiplomasi menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak lagi hanya berlangsung pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga dapat dikembangkan melalui kepentingan dan kebutuhan daerah. Dalam konteks Indonesia, praktik tersebut menjadi relevan bagi wilayah perbatasan yang memiliki kedekatan geografis,

ekonomi, dan sosial budaya dengan negara tetangga (Mukti, 2024; Puspitarini et al., 2021). Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam hubungan lintas batas Indonesia–Malaysia. Kedekatan dengan Johor Bahru didukung oleh konektivitas transportasi laut, interaksi ekonomi, serta kedekatan sejarah dan budaya Melayu. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan hubungan sosial masyarakat. Studi mengenai kerja sama lintas batas menegaskan bahwa konektivitas dapat memperkuat interaksi ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan (Kartini et al., 2020 ; Riawan & Akbar, 2024).

Dalam konteks tersebut, kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) menjadi salah satu forum yang mempertemukan kepentingan Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan persoalan sosial ekonomi perbatasan. Kerja sama ini menyediakan ruang koordinasi antaraktor dan dapat menjadi medium pertukaran informasi mengenai kebutuhan kawasan perbatasan. Penelitian mengenai Sosek Malindo juga menunjukkan bahwa kerja sama regional tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan persoalan lintas batas (Farhan et al., 2026 ; Yagoza & Maksum, 2024).

Salah satu inisiatif yang berkembang dalam hubungan Kepulauan Riau–Johor adalah Program Jiran Istimewa (JIWA). Berdasarkan penelitian, JIWA dirumuskan pada 2024, dibahas dalam forum Sosek Malindo pada 2025, dan diluncurkan di Batam pada 17 Mei 2025. Program ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas pariwisata dan ekonomi melalui platform digital, promosi, dan penawaran khusus bagi masyarakat di kedua wilayah. Program juga melibatkan pelaku usaha sebagai bagian dari ekosistem kerja sama lintas batas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas paradiplomasi daerah Indonesia, kerja sama lintas batas, dan hubungan Kepulauan Riau–Johor. Anshari dan Anshari & Mahfudin (2024) misalnya, menelaah paradiplomasi Kepulauan Riau–Johor dalam perlindungan pekerja migran. Rachmawati et al (2022) membahas peran paradiplomasi dalam pengembangan kawasan perbatasan Aruk, sedangkan Novialdi & Rasanjani (2022) mengkaji peluang dan tantangan praktik paradiplomasi pemerintah daerah Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Program JIWA sebagai inisiatif paradiplomasi Kepulauan Riau–Johor dan relasinya dengan forum Sosek Malindo masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap JIWA sebagai praktik paradiplomasi yang berkembang secara bottom-up, melibatkan pemerintah daerah, KJRI, pemerintah Johor, dan pelaku usaha, serta menggabungkan promosi pariwisata dengan insentif ekonomi melalui platform digital. Penelitian juga melihat posisi Sosek Malindo bukan semata-

mata sebagai pelaksana program, tetapi sebagai ruang pengenalan, koordinasi, dan penguatan kerja sama lintas batas. Berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi, penelitian ini bertujuan memahami implementasi paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Johor Bahru melalui Sosek Malindo dalam Program JIWA, termasuk pola koordinasi, hasil, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Paradiplomasi

Paradiplomasi digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional. Paradiplomasi memungkinkan pemerintah subnasional membangun hubungan dengan aktor luar negeri untuk mengejar kepentingan pembangunan daerah, seperti ekonomi, pariwisata, sosial, dan budaya. Dalam praktiknya, paradiplomasi tidak berarti pemerintah daerah mengambil alih kewenangan diplomasi negara, tetapi berlangsung dalam ruang kewenangan yang tersedia dan tetap berada dalam kerangka hukum nasional (Diffaul & Suwartono, 2023; Mukti, 2020; Mukti, 2024).

Dalam penelitian ini, paradiplomasi dipahami melalui beberapa karakter utama, yaitu keterlibatan aktor subnasional, orientasi pada kepentingan daerah, kerja sama langsung dengan wilayah luar negeri, serta keterlibatan aktor non-negara. Praktik tersebut dapat berlangsung melalui kerja sama pemerintah, forum regional, promosi ekonomi, pertukaran budaya, dan pengembangan pariwisata. Puspitarini et al (2021) dan Aristawati & Wati (2023) memperlihatkan bahwa praktik paradiplomasi perlu dipahami dalam relasinya dengan pemerintah pusat dan kepentingan daerah.

Kerja Sama Lintas Batas dan Sosek Malindo

Kerja sama lintas batas merupakan bentuk interaksi antarwilayah yang memiliki kepentingan bersama dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Konektivitas transportasi, aktivitas ekonomi, dan kedekatan sosial budaya dapat menjadi faktor yang memperkuat kerja sama. Dalam konteks Indonesia–Malaysia, Sosek Malindo menjadi forum kerja sama yang memfasilitasi pembahasan persoalan sosial ekonomi di kawasan perbatasan. Kerangka tersebut relevan untuk melihat bagaimana inisiatif lokal dapat dikomunikasikan dan dikembangkan melalui mekanisme kerja sama yang lebih luas (Kartini et al., 2020; Yagoza & Maksum, 2024a).

Program Jiran Istimewa sebagai Instrumen Paradiplomasi

JIWA dipahami sebagai instrumen kerja sama lintas batas yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Program ini menggunakan pendekatan promosi

pariwisata, insentif bagi masyarakat, keterlibatan tenant, dan platform digital. Karakter tersebut menunjukkan bahwa paradiplomasi tidak hanya berbentuk pertemuan formal antarpemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi jejaring kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat. Transformasi digital juga memungkinkan penyebaran informasi dan partisipasi publik dalam kerja sama lintas wilayah (Mannayong et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Johor Bahru melalui Sosek Malindo dalam Program Jiwa. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen kunci dan data dianalisis secara induktif dengan menekankan makna serta konteks fenomena (Sugiyono, 2023).

Objek penelitian adalah aktivitas paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Johor Bahru melalui Sosek Malindo dan Program Jiwa, dengan lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pihak yang terlibat dalam kerja sama. Data sekunder berasal dari dokumen kerja sama, laporan pertemuan Sosek Malindo, arsip pemerintah, publikasi resmi, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber daring yang relevan.

Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan terhadap objek penelitian. Informan utama dan kunci berasal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan informasi diperkuat melalui penggunaan berbagai sumber data dan perbandingan keterangan antarinforman dengan dokumen yang tersedia. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi paradiplomasi, kontribusi Sosek Malindo, manfaat program, serta faktor penghambat implementasi Jiwa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terwujudnya Program Jiran Istimewa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya JIWA tidak dapat dilepaskan dari kedekatan geografis, historis, dan budaya antara Kepulauan Riau dan Johor. Konektivitas laut melalui jalur ferry menjadi faktor penting karena memungkinkan mobilitas masyarakat antarkedua wilayah. Selain itu, terdapat kepentingan bersama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas pasar pelaku usaha, dan memperkuat hubungan sosial ekonomi masyarakat perbatasan.

Program JIWA mulai dirumuskan pada 2024 oleh KJRI Johor Bahru bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada 2025, inisiatif tersebut diperkenalkan dan dibahas dalam forum Sosek Malindo, kemudian diluncurkan di Batam pada 17 Mei 2025. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif daerah dapat bergerak dari tahap perumusan lokal menuju ruang koordinasi regional.

JIWA juga memiliki karakter bottom-up. Inisiatif awal tidak muncul sebagai kebijakan bilateral yang sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat kedua negara, tetapi berkembang dari kebutuhan dan inisiatif aktor di tingkat subnasional. Karakter ini sejalan dengan pandangan bahwa paradiplomasi dapat berkembang dari kebutuhan praktis daerah untuk membangun hubungan dengan mitra luar negeri (Anshari & Mahfudin, 2024; Novialdi & Rasanjani, 2022).

Dalam implementasinya, JIWA memberikan penawaran khusus bagi masyarakat Kepulauan Riau dan Johor yang memenuhi ketentuan identitas wilayah. Program melibatkan hotel, restoran, transportasi, atraksi wisata, layanan kesehatan dan kecantikan, serta pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, JIWA tidak hanya berfungsi sebagai promosi pariwisata, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Kontribusi Sosek Malindo dalam Mewujudkan Kerja Sama JIWA

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Sosek Malindo tidak menjadi pelaksana operasional utama Program JIWA. Kontribusinya lebih terlihat sebagai forum untuk memperkenalkan, membahas, dan menyebarluaskan inovasi kerja sama yang berkembang di kawasan perbatasan. JIWA diperkenalkan dalam forum Sosek Malindo sebagai best practice dan lesson learned, sehingga program memperoleh ruang untuk dikenal oleh aktor kerja sama lintas batas.

Posisi tersebut menunjukkan hubungan yang bersifat komplementer. JIWA menyediakan praktik konkret di tingkat daerah, sementara Sosek Malindo menyediakan ruang koordinasi dan pertukaran pengalaman. Pola tersebut sesuai dengan perkembangan kerja sama perbatasan yang membutuhkan interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor

lainnya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Yagoza & Maksun (2024) mengenai peran Sosek Malindo dalam menangani persoalan lintas batas.

Implementasi Paradiplomasi Pemerintah Kepulauan Riau–Johor melalui Jiwa

Implementasi Jiwa memperlihatkan keterlibatan multisektor. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berperan dalam mendukung kerja sama daerah dan menghubungkan kepentingan program dengan sektor pariwisata dan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah berperan dalam fasilitasi dan koordinasi urusan perbatasan, sedangkan Dinas Pariwisata mendukung promosi dan pengembangan pariwisata. KJRI Johor Bahru berperan sebagai fasilitator hubungan dengan pihak Johor. Pelaku usaha menjadi aktor penting karena menyediakan fasilitas dan penawaran yang dapat digunakan masyarakat.

Platform digital menjadi salah satu karakter utama Jiwa. Digitalisasi memungkinkan informasi promosi, destinasi, mitra usaha, dan manfaat program disebarkan kepada masyarakat. Keterlibatan teknologi memperluas ruang paradiplomasi dari hubungan antarlembaga menjadi interaksi yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih langsung. Hal ini memperkuat karakter paradiplomasi yang kolaboratif dan berbasis jejaring (Mannayong et al., 2024).

Tabel 1. Jumlah Tenant Program Jiran Istimewa.

Wilayah	Jumlah Tenant	Proporsi
Kepulauan Riau	84	70,0%
Johor	36	30,0%
Total	120	100%

Sumber: Data Program Jiwa dalam skripsi, diolah penulis.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 120 tenant yang terlibat dalam Program Jiwa, terdiri atas 84 tenant di Kepulauan Riau dan 36 tenant di Johor. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa implementasi program telah melibatkan sektor usaha dari kedua wilayah. Keterlibatan tenant menjadi penting karena manfaat kerja sama dapat diteruskan kepada masyarakat melalui layanan, promosi, dan insentif ekonomi.

Dampak terhadap Hubungan Sosial, Pariwisata, dan Ekonomi

Program Jiwa memberikan kontribusi pada penguatan hubungan sosial dan ekonomi lintas batas melalui peningkatan interaksi masyarakat, promosi destinasi, serta keterlibatan pelaku usaha. Program tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperluas peluang masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata dan perdagangan jasa. Data dalam skripsi menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada 2024 mencapai 1.658.959 kunjungan, meningkat 8,36 persen dibandingkan 2023. Kunjungan wisatawan asal Malaysia meningkat dari 225.074 menjadi

335.182 kunjungan atau sebesar 48,92 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya konteks pertumbuhan pasar wisata Malaysia yang relevan dengan pengembangan kerja sama Kepulauan Riau–Johor. Namun, peningkatan tersebut tidak dapat diklaim semata-mata sebagai akibat langsung Jiwa karena dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti konektivitas, kondisi pariwisata, dan kebijakan perjalanan.

Dari perspektif sosial, interaksi lintas batas memperkuat hubungan masyarakat yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya. Dari perspektif ekonomi, keterlibatan tenant membuka peluang bagi hotel, restoran, transportasi, atraksi wisata, dan usaha lainnya untuk memperoleh pasar lintas wilayah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kerja sama lintas batas dapat memiliki dampak yang melampaui hubungan formal pemerintah, terutama ketika masyarakat dan sektor usaha dilibatkan (Damayanti & Rahmadiena, 2025; Setyawan et al., 2025).

Faktor Penghambat Implementasi Program Jiwa

Keterbatasan regulasi dan kewenangan pemerintah daerah menjadi hambatan utama. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh atas seluruh kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan transportasi lintas batas. Dalam hal harga tiket dan kebijakan transportasi laut, misalnya, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan atau keputusan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang paradiplomasi tetap dipengaruhi oleh pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan Indonesia (Diffaul & Suwartono, 2023). Koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya optimal. Program melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, KJRI, pihak Johor, serta pelaku usaha. Hasil wawancara memperlihatkan adanya perbedaan persepsi mengenai efektivitas koordinasi. Dari sisi KJRI, komunikasi antaraktor dinilai telah berjalan, tetapi masih diperlukan SOP yang lebih baik. Dari sisi pemerintah daerah, terdapat persoalan ketika kebutuhan teknis harus dikoordinasikan ke tingkat pusat. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya pembagian tugas, alur komunikasi, dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas. Belum tersedianya roadmap dan indikator keberhasilan yang seragam. Dinas Pariwisata belum memiliki indikator khusus untuk mengukur keberhasilan Jiwa, sementara KJRI mulai melakukan monitoring melalui pendataan penggunaan fasilitas program dengan QR Code. Perbedaan ukuran keberhasilan dapat menyulitkan evaluasi. Karena itu, diperlukan roadmap yang menetapkan target jangka pendek, menengah, dan panjang, serta indikator yang dapat digunakan bersama oleh seluruh aktor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Jiran Istimewa merupakan bentuk implementasi paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Johor Bahru yang berkembang melalui inisiatif bottom-up dan pendekatan kolaboratif. Kedekatan geografis, historis, budaya, dan konektivitas laut menjadi faktor penting yang mendukung terbentuknya kerja sama. Program dirumuskan pada 2024, dibahas dalam forum Sosek Malindo pada 2025, dan diluncurkan di Batam pada 17 Mei 2025.

JIWA diwujudkan melalui promosi pariwisata digital, penawaran khusus bagi masyarakat Kepulauan Riau dan Johor, keterlibatan pelaku usaha, serta penguatan interaksi sosial ekonomi lintas batas. Terdapat 120 tenant yang terlibat, terdiri atas 84 tenant di Kepulauan Riau dan 36 tenant di Johor. Sosek Malindo berkontribusi sebagai ruang koordinasi, pengenalan, dan penyebarluasan inovasi, sedangkan implementasi operasional JIWA lebih banyak berkembang melalui kerja sama aktor subnasional dan jejaring pendukung.

Meskipun memberikan peluang penguatan pariwisata dan ekonomi serta hubungan sosial masyarakat, implementasi JIWA masih menghadapi keterbatasan regulasi dan kewenangan daerah, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta belum tersedianya roadmap dan indikator keberhasilan yang seragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama KJRI dan mitra Johor perlu menyusun roadmap dan SOP bersama, memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi, serta mengembangkan indikator kinerja yang dapat mengukur manfaat program secara berkala. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas JIWA secara kuantitatif berdasarkan data penggunaan fasilitas, pertumbuhan tenant, kunjungan wisatawan, dan dampak ekonomi pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis berjudul “Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau–Johor Bahru melalui Sosek Malindo dalam Program Jiran Istimewa (JIWA)”. Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung proses penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Anshari, M. I., & Mahfudin, I. A. (2024). Strengthening paradiplomacy for migrant worker protection: The collaboration between Riau Islands Province and Johor State (2019–2024). *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 3(2), 84–101.
- Aristawati, S. A. P., & Wati, U. R. (2023). Penegakan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). *Indigenous Knowledge*, 1(2), 179–187.
- Damayanti, C., & Rahmadiena, Q. (2025). Enhancing cross-border tourism between Indonesia and Timor-Leste: Indonesia's tourism diplomacy. *International Journal of Social Research and Development*, 7(2), 3–7.
- Diffaul, R., & Suwartono, B. (2023). Mencermati kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri: Batasan kewenangan dan keabsahannya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 300–323. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>
- Farhan, F. A., Darmawan, E., Kustiawan, A., Adiputr, S. Y., Sapitri, K. E., Togatorop, N. E., & Putri, J. N. (2026). Analisis program kerja sama regional Sosek Malindo dengan human trafficking melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 3(1), 8–17.
- Kartini, I., Irewati, A., Rahman, A., Pudjiastuti, N. T., Luhulima, D. R., Ikhfal, N. S., Nufus, H., & Raharjo. (2020). Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 117–140.
- Mannayong, J., Rizal, M., & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif digital. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), 51–72.
- Mukti, A. T. (2020). *Politik paradiplomasi dan isu kedaulatan di Indonesia*. The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2024). *Paradiplomasi Indonesia dalam hukum nasional dan internasional*. Komojoyo Press.
- Novialdi, R., & Rasanjani, S. (2022). Mengkaji peluang dan tantangan praktik paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(2), 108–124. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i2.29450>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, Pub. L. No. 25 (2020). <https://peraturan.go.id/files/bn513-2020>
- Puspitarini, R. C., Septiarika, F. T., & Bramastya, R. (2021). Praktik paradiplomasi dalam implementasi kerjasama smart city pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul. *Perspektif*, 10(2), 569–577. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4850>
- Rachmawati, I., Pero, M. D. S., & Wirawan, M. R. (2022). The role of paradiplomacy in the development of the Aruk border area. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 1(2), 66–80. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v1i2.18>
- Riawan, A. W., & Akbar. (2024). Transformasi ekonomi daerah Kepulauan Riau yang inklusif dan berkelanjutan melalui triple konsep: Pariwisata, ekonomi biru, dan kerjasama internasional Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT). *Jurnal Archipelago*, 3(1), 29–40.

- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., Syahril, & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yagoza, S., & Maksum, A. (2024a). Paradiplomacy in the border: Overcoming forest fire in West Kalimantan–Sarawak border through the Sosek Malindo cooperation. *Multidisciplinary Reviews*, 4(2), 1–11.
- Yagoza, S., & Maksum, A. (2024b). Paradiplomacy in the border: Overcoming forest fire in West Kalimantan–Sarawak border through the Sosek Malindo cooperation. *Multidisciplinary Reviews*, 7(11), 1–11. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024264>